
KEBIJAKAN SULTAN SYARIF ABDURRAHMAN ALKADRIE DALAM PEMAJUAN EKONOMI KESULTANAN PONTIANAK (1771-1808 M)

Samsil Aminullah

syamsil1909@gmail.com

Ma'had Aly Sa'idussiddiqiyah Jakarta

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kebijakan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dalam pemajuan ekonomi Kesultanan Pontianak antara tahun 1771 hingga 1808 M. Penelitian ini sedekat mungkin mengeksplorasi peran Sultan dalam mengembangkan sektor ekonomi melalui kebijakan-kebijakan seperti perdagangan, pertanian, dan infrastruktur. Metode historis digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Sultan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pontianak pada periode tersebut. Temuan utama mencakup strategi Sultan dalam memperkuat sektor ekonomi guna melanjutkan pemerintahannya dengan berbagai pendekatan dibantu unsur geografisnya yang menunjang. Penulis menemukan bahwa kontribusi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie terhadap keadaan ekonomi masyarakat Pontianak di tahun tersebut sangat berkembang pesat. Terlebih pada tahun tersebut, VOC dan kongsinya juga nyatanya berperan dalam memberikan kemudahan akses dan relasi dagang kesultanan dalam mendistribusikan hasil bumi kesultanan Pontianak. Penulisan ini menggunakan studi pustaka dengan bentuk penelitian sejarah berbasis kualitatif dengan pendekatan teori peran.

Kata Kunci: *Pontianak, Alkadrie, Sultan, Sejarah Ekonomi.*

Abstract

This paper discusses the policies of Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie in advancing the economy of the Pontianak Sultanate between 1771 and 1808 AD. This research contextually explores the Sultan's role in developing the economic sector through policies such as trade, agriculture, and infrastructure. The historical method is used to analyze the Sultan's economic policies, as well as their impact on the economic growth and welfare of the people of Pontianak during that period. The main findings include the Sultan's strategy in empowering the economic sector in order to continue his reign with various approaches aided by his supportive geographical elements. The author found that Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie's contribution to the economic condition of the people of Pontianak in that year was very rapidly increasing. Moreover, in that year, the VOC and its company also in fact played a role in providing easy access and trade relations for the sultanate in distributing the Pontianak sultanate's agricultural products. This writing uses a literature study with a qualitative-based form of historical research with a process approach to the role theory.

Keywords: Pontianak, Alkadrie, Sultan, Economic History.

ملخص

هذا البحث يدرس سياسات السلطان شريف عبد الرحمن القادري في تنمية اقتصاد سلطنة بونتياناك منذ عام 1771 إلى 1808 ميلادية. يستكشف البحث دور السلطان في تطوير قطاعات الاقتصاد مثل التجارة والزراعة والبنية التحتية من خلال سياسات محددة. يتم استخدام المنهج التاريخي لتحليل السياسات الاقتصادية للسلطان والتأثيرات التي ترتبط بنمو الاقتصاد ورفاهية مجتمع بونتياناك خلال هذه الفترة. وتشمل النتائج الرئيسية استراتيجيات السلطان في تعزيز الاقتصاد لضمان استمرارية حكمه باستفادة من الميزات الجغرافية المساعدة. وقد اكتشف الباحث أن مساهمة السلطان شريف عبد الرحمن القادري في تحسين الوضع الاقتصادي لسكان بونتياناك في تلك السنوات كانت كبيرة. ولا سيما في ظل دور شركة هولندية الهند الشرقية (VOC) وشبكاتها التجارية التي ساعدت في تسهيل الوصول والعلاقات التجارية لتوزيع منتجات الزراعة في سلطنة بونتياناك. هذا البحث يعتمد على دراسة الأدب القديم بمنهجية البحث التاريخي النوعي مع التركيز على نظرية الدور كمنهج تحليلي. الكلمات الرئيسية: بونتياناك القادري السلطان تاريخ اقتصادي

PENDAHULUAN

Sejarah berdirinya Kesultanan Pontianak tidak bisa lepas dari kota Pontianak berdiri. Hal ini karena kesultanan ini merupakan kerajaan paling akhir yang ada di Kalimantan dan sebagai cikal bakal berdirinya Kota Pontianak. Diawali dari sebuah peristiwa yang diyakini masyarakat tentang seorang ulama dari Hadramaut Yaman, bernama Syarif Abdurrahman Al-Kadrie¹. Pada pagi hari, Rabu, 23 Oktober 1771. Pada tanggal 23 Oktober 1771 inilah (14 Rajab 1184 H), tepatnya menjelang subuh, mereka akhirnya sampai di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Rombongan Syarif Alkadrie kemudian menebang pohon-pohon di hutan selama delapan hari guna keperluan membangun rumah, balai, dan sebagainya. Di tempat itulah Kesultanan Kadriah berdiri beserta Masjid Jami' dan Keraton Pontianak. Pada 8 Sya'ban tahun 1192 H, Syarif Alkadrie akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak (Kesultanan Kadriah) dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al Habib Alkadrie.²

Sebagai keturunan dari Habib Husein Alkadrie, seorang ulama dari Hadramaut, upayanya tersebut dipercaya masyarakat setempat didorong oleh cita-cita ayahnya untuk mengembangkan permukiman baru yang dapat dijadikan tempat mengajarkan Islam sekaligus berdagang.³ Dalam menjalankan misinya itu, Syarif Abdurrahman Alkadrie tampak piawai dalam mewarisi bakat ayahnya sebagai kaum Hadrami yang migrasi, sampai mampu menjadi penguasa di daerah baru. Bakat berupa kecerdasan politik serta karisma politik dan spiritual yang digabungkan dengan praktik perkawinan politik adalah modal utama bagi Syarif Abdurrahman. Modal ini mulanya digunakan untuk menjalin relasi dagang sekaligus hubungan politik dengan para penguasa di kerajaan-kerajaan maritim seperti Palembang, Riau, Banjarmasin, dan Passir.⁴

Secara mendetail, Sultan Syarif Abdurrahman merupakan putera dari seorang ayah yang bernama Al-Habib Husain dengan seorang dayang dari kerajaan Matan Putri Nyai Tua. lahir di Matan, pada hari Senin 15 Rabiul Awal 1154 H. Pada bulan Muharram 1160 H, Habib Husain beserta keluarganya bertolak dari kerajaan Matan menuju kerajaan Mampawah atas undangan raja Mampawah Opu Daeng Manambon, pada saat itu Syarif Abdurrahman masih berusia 6 tahun. Ketika Sultan Syarif Abdurrahman berusia 18 tahun, ia dinikahkan dengan Uti Candra Midi yang merupakan putri dari raja Mampawah (Opu Daeng Manambon). Dari pernikahan itu, Syarif Abdurrahman diberi gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Alkadrie.⁵

Setelah 20 tahun berada di Mampawah Pangeran Syarif Abdurrahman Alkadrie melakukan perjalanan dengan berlayar menuju Tambelan, Riau, Palembang kemudian menuju Banjarmasin untuk berdagang rempah-rempah, lada, kain sutera dan hasil perkebunan lainnya. Ketika berada di Banjarmasin, Pangeran Syarif Abdurrahman Alkadrie diberi gelar Syarif

¹ Sebagian literatur menggunakan *Al-Kadrie*, *Alkadri*, *Al-Qadrie*, *Al-Qodri*. Penulis cenderung menggunakan *Alkadrie* sebagaimana literatur yang lebih banyak dipakai.

² Basuki Wibowo, *Optimalisasi Keraton Kadriyah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Pontianak Kalimantan Barat*, *Jurnal Edukasi*, Vol 1, No 1, (Juni, 2014), hlm 17

³ Ansar Rahman, *Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak* (Pemerintah Kota Pontianak: Romeo Grafika Pontianak, 2000), h. 3.

⁴ E. Netscher, *Geschiedenis der Eerste Al-Qadris*, (Tijdschrift voor Indische Taal: Land, en Volkenkunde, 1855), h. 297-298.

⁵ Alfian Firmanto, *Jejak Sejarah Kesultanan Pontianak (Kajian Inskripsi situs Makam Batu Layang)*, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol 10, No 2 (2012), h. 259.

Abdurrahman Nur Alam oleh Sultan Saad (Raja Kerajaan Banjar) setelah ia dinikahkan dengan puterinya yang bernama Syarifah Anom atau Ratu Syahranom.

Karena pernikahan itu, Pangeran Syarif Abdurrahman Alkadrie juga ikut mengatur kerajaan Banjar. Namun, dari pernikahan itu banyak para elit kerajaan yang kurang menyukainya karena pernikahan Pangeran Syarif Abdurrahman dengan Syarifah Anom dianggap sebagai pernikahan politik untuk memperkuat aliansi tiga kerajaan yang ada di Kalimantan, yaitu kerajaan Mampawah, Matan dan Banjar, sehingga membuat Pangeran Syarif Abdurrahman memutuskan untuk kembali ke Mampawah.⁶

Sesampainya di Mampawah, Pangeran Syarif Abdurrahman disebut juga kurang disenangi oleh para elit politik kerajaan Mampawah. Sehingga Syarif Abdurrahman bersama saudara-saudaranya Syarif Abu Bakar, Syarif Ahmad, Syarif Alwi dan Syarif Muhammad, serta para pengikutnya yang mayoritas orang-orang Bugis pada tahun 1771 M, memutuskan mengembara meninggalkan Mampawah untuk mencari wilayah pemukiman baru. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Pangeran Syarif Abdurrahman dan para pengikutnya tiba di muara pertemuan sungai Kapuas dan sungai Landak. Di tempat itu dikenal sebagai basis perompak yang selalu menakut-nakuti para pedagang yang hilir mudik melalui daerah tersebut. Dengan berbekal meriam, Pangeran Syarif Abdurrahman menembakkan meriam tersebut ke arah sarang perompak tersebut dan berhasil melumpuhkannya.⁷

Tidak hanya mendapat gangguan dari para perompak, Pangeran Syarif Abdurrahman Alkadrie konon juga mendapatkan gangguan dari para mahluk halus yang menghuni wilayah tersebut, akhirnya Pangeran Syarif Abdurrahman bersama para pengikutnya berhasil menaklukkan mahluk halus tersebut.⁸ Setelah menaklukkan perompak dan mahluk halus, Pangeran Abdurrahman bersama para saudara dan pengikutnya melakukan musyawarah dan bermufakat untuk membuka wilayah pemukiman baru yang diselimuti hutan belantara tepat pada jatuhnya peluru meriam yang ditembakkan. Tidak hanya itu, Pangeran Syarif Abdurrahman juga berpikir bahwa wilayah tersebut sangat strategis dalam berbagai aspek seperti kehidupan sosial ekonomi, muara sungai menopang pelayaran dan perdagangan, pertahanan untuk menunjang wilayah ini sebagai pusat kota.⁹ Daerah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Pontianak. Setelah beberapa hari menebas lahan hutan belantara, Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie kemudian mendirikan tempat tinggal yang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, seperti dari bambu dan ilalang yang tempat tersebut sekarang dijadikan sebagai Masjid Jami'

⁶ Haris Firmansyah, dkk, *Penggunaan Biografi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah*, *Jurnal Agastya*, Vol 11, No 2, (Juli 2021), h. 163.

⁷ Alfian Firmanto, *Jejak Sejarah Kesultanan Pontianak (Kajian Inskripsi situs Makam Batu Layang)*, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol 10, No 2 (2012), h. 260.

⁸ Lisyawati Nurcahyani, dkk, *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra*, (Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya, 1999), h. 12.

⁹ Asnaini, *Sistem Pemerintahan Kota Pontianak 1771-1945*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), h. 23-24.

Kota Pontianak, atas kesepakatan dari para pengikutnya, ia dilantik sebagai raja di Kerajaan Pontianak pada September 1778, dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadrie.¹⁰

Berkisar kurang dari 30 tahun Sultan Syarif Abdurrahman berkuasa sebagai Sultan di Kerajaan Pontianak atau yang lebih dikenal sekarang dengan sebutan Kraton Kadriyah Pontianak, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena kota Pontianak merupakan wilayah yang letak geografisnya yang sangat strategis secara akses perdagangan kala itu. Interaksi sosial yang harmonis antara keluarga Sultan dan juga masyarakat secara timbal balik juga turut mempengaruhi, dan juga faktor kepemimpinan yang positif dari sultan dan juga para keluarganya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menganalisis kemajuan ini.¹¹

Kemudahan akses ini seringkali membuat cara pandang sultan yang lebih terbuka terhadap dunia luar. Fakta ini bisa dilihat misalnya saja pada aspek arsitektural. Bentuk arsitektur bangunan kerajaan Melayu pada umumnya dirancang dan dibangun dengan kreativitas serta kemampuan estetika oleh masyarakat Melayu sendiri. Dalam mendirikan rumah maupun istana, lokasi tapak pembangunan berdekatan dengan sungai atau laut. Ketentuan ini kemudian menjadi konsep Kesultanan Melayu Pontianak, yaitu terdiri dari istana, masjid, lapangan, sungai, pelabuhan dan pasar. Melihat dari spesifikasi diatas, Kesultanan Kadriyah Pontianak sangat menjaga hubungannya dengan masyarakat, sehingga para petinggi kerajaan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.¹²

Di sisi lainnya, penduduk Kota Pontianak yang kala itu terpantau *heterogen* menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya bermacam-macam pula. Sebagian masyarakat ada yang menjadi nelayan seperti yang dilakukan oleh mayoritas orang Melayu, ada yang melakukan cocok tanam padi dan berburu seperti yang dilakukan oleh orang Dayak, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan diiringi dengan datangnya suku-suku lain dari luar daerah Kalimantan, jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Pontianak mengalami perkembangan. Jika pada mulanya mayoritas masyarakat Pontianak lebih banyak melakukan agrokultur dengan cocok tanam padi, maka kemudian setelahnya beralih melakukan perdagangan di aliran sungai Kapuas dengan menggunakan sampan-sampan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena beranggapan bahwa bertani padi tidak terlalu cukup untuk memenuhi kehidupannya.¹³

Melihat perdagangan di Kota Pontianak berkembang semakin pesat yang dikuasai oleh Sultan Syarif Abdurrahman membawa perkembangan politik dan ekonomi tersendiri bagi

¹⁰ Basuki Wibowo, Optimalisasi Kraton Kadriyah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Pontianak Kalimantan Barat, *Jurnal Edukasi*, Vol 1, No 1, (Juni, 2014), h. 17.

¹¹ Syarif Ibrahim Al-Qadrie, *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1984), h. 106-107.

¹² Solihah Titin Sumanti, *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang)*, (Yogyakarta: Atap Buku, 2019), h. 39.

¹³ Lisyawati Nurcahyani, dkk, *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra*, (Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya, 1999), h 20-22.

Pontianak. Hal ini ditandai dengan dijadikannya Pontianak sebagai tempat perlabuhan kapal dagang dari berbagai negara untuk melakukan perdagangan di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak. Pelabuhan Pontianak ini memiliki daya penarik yang besar bagi kapal-kapal dari luar, dalam arti menjadi pasar yang ramai, dimana hasil-hasil hutan dari pedalaman diperdagangkan dan tersedianya bahan bakar kapal. Semua kriteria itu telah dimiliki oleh pelabuhan Pontianak, sehingga tidak heran jika Pontianak disebut sebagai pelabuhan terbesar Kalimantan Barat.¹⁴

Penulis tertantang untuk mencari data ini, hanya saja informasi yang membahas tuntas tentang kehidupan masyarakat Pontianak yang memfokuskan tulisannya pada kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya tidak melimpah. Sejauh ini, penulis hanya menemukan buku yang ditulis oleh *P.J Veth* yang berbahasa Belanda dengan Judul “*Borneo’s Wester-afdeling. Geographisch, Statistisch, Historisch*”, yang diterbitkan oleh *Joh. Noman En Zoon* di *Zaltbommel* (Belanda) pada tahun 1854 dan juga beberapa literatur seperti buku, skripsi, jurnal dan beberapa sumber lainnya yang pembahasannya menyinggung hal yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti.

Kedatangan para pedagang asing ke Kalimantan Barat dipelopori oleh pedagang dari Cina. Mereka datang pertama kali ke Kalimantan Barat pada abad ke 17 dengan menempuh dua jalur. Jalur pertama melalui Semenanjung Indocina (Asia tenggara) menuju Malaka dan kemudian menyebar ke pantai Kalimantan Barat terutama daerah Sambas dan Mampawah. Sedangkan jalur kedua melalui Kalimantan Utara menuju daerah pedalaman dan Mampawah Hulu untuk mencari tambang emas di daerah Mandor, Budog dan Monterado. Dengan ditemukannya tambang emas tersebut membuat masyarakat Cina melakukan imigrasi besar-besaran ke Kalimantan Barat. Kedatangan para pedagang ini masuk ke Kalimantan Barat melalui jalur yang sama dengan yang dilakukan oleh Cina.¹⁵

Setelah melihat perkembangan dari perdagangan di Pontianak di atas, Inggris melalui East India Company (EIC)¹⁶ mulai menaruh perhatiannya, sehingga Inggris membuka kantor dagangnya di Sukadana (Kayong Utara) Kalimantan Barat. Kegiatan perdagangan Inggris ini mendorong VOC untuk terlibat dalam perdagangan di Kalimantan Barat. VOC juga memperhatikan perdagangan Pontianak setelah pedagang Bugis, Melayu, dan Cina melakukan perdagangan. Setiap tahunnya pedagang Cina menggunakan jung atau kapal layar menyinggahi Pontianak dengan membawa kain dan emas.¹⁷

¹⁴ Marwati Djoened, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 153.

¹⁵ Lisyawati Nurcahyani, dkk, *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra*, (Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya, 1999), h. 70-74.

¹⁶ East India Company adalah perusahaan Inggris yang dibentuk untuk eksploitasi perdagangan dengan Asia Timur dan Tenggara serta India. Didirikan berdasarkan piagam kerajaan pada tanggal 31 Desember 1600. Dimulai sebagai badan perdagangan monopoli, perusahaan tersebut terlibat dalam politik dan bertindak sebagai agen Inggris. imperialisme di India dari awal abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Selain itu, aktivitas perusahaan di Tiongkok pada abad ke-19 menjadi katalisator perluasan pengaruh Inggris di sana.

¹⁷ Mari Somers Heidhues, *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di Distrik Tionghoa Kalimantan Barat*, (Jakarta: Yayasan Nabil, 2008), h. 37.

Barang-barang komoditi selebihnya pada abad modern yang berasal dari Kalimantan Barat, seperti karet, lada dan hasil hutan lainnya diekspor ke berbagai negara asing, seperti Singapura, Hongkong, Belanda, Jepang dan lainnya melalui pelabuhan Pontianak, dimana barang-barang komoditi tersebut sangat dibutuhkan oleh negara-negara asing sehingga laku keras. Kapal-kapal yang datang ke pelabuhan Pontianak membawa barang-barang seperti pakaian dan alat-alat rumah tangga yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Kalimantan Barat. Pajak yang dipungut dari para pedagang oleh Sultan merupakan penghasilan yang besar, sehingga secara ekonomis membawa kemajuan bagi Pontianak.¹⁸ Peraturan memberlakukan pajak bagi orang asing yang masuk ke Pontianak, baik imigrasi maupun yang hanya melakukan perdagangan dikenai pajak sebesar 1 Gulden per orang, sedangkan bagi para imigran yang ingin keluar dari Pontianak dikenai pajak sebesar 15 Gulden per orang.¹⁹

Perkembangan perdagangan Pontianak ini mendorong Sultan Syarif Abdurrahman melakukan ekspansi terutama pada wilayah Sanggau dan berhasil menaklukkannya dengan bantuan VOC pada tanggal 26 Maret 1778. Dengan adanya hal tersebut, secara otomatis hubungan antara Kesultanan dengan VOC semakin erat, sehingga terdapat jalinan hubungan perdagangan antara keduanya setelah Reiner de Klerk Gubernur Jenderal VOC mengutus William Adrian Palm untuk melakukan hubungan perdagangan dan keamanan dengan Sultan Syarif Abdurrahman sekaligus William Adrian Palm diangkat sebagai perwakilan dari VOC yang ada di Pontianak.²⁰

Dalam faktanya, Pontianak di bawah pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie berhasil menjadi daerah yang berkembang dengan pesat terutama dalam sektor ekonominya. Hal ini ditandai dengan dijadikannya Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan tempat kapal-kapal asing bersandar untuk mengimpor dan mengekspor barang. Selain letak Pontianak yang strategis, tentu dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie melalui kebijakannya bekerja sama dengan mitra dagang dan juga mengolah pajak dengan baik dari para pedagang asing yang datang ke Pontianak.

Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie wafat pada tahun 1808, Sultan Syarif Qasim menyatakan dirinya sebagai pengganti dan menghadap kepada Gubernur Jendral di Batavia untuk menyatakan dirinya sebagai Raja Pontianak. Walaupun sesungguhnya Sultan Syarif Abdurrahman menunjuk putranya Syarif Ustman sebagai sultan. Namun, karena usia Syarif Ustman yang masih muda memberikan kekuasaannya kepada Sultan Syarif Qasim sebagai Raja Pontianak.²¹

¹⁸ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Sejarah Kerajaan dan Perkembangan Kota Pontianak*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 1980), h. 60.

¹⁹ Hasanuddin, Politik Dan Perdagangan Kolonial Belanda Di Pontianak, Vol 8, No 2, *Jurnal Patanjala*, (Juni 2016), h. 207.

²⁰ P.J Veth, *Borneo's Wester-afdeling. Geographisch, Statistisch, Historisch*, (Zaltbommel: Joh. Noman En Zoon, 1854), hlm 250.

²¹ Hasanuddin, Proses Terbentuknya Heterogenitas Etnis Pontianak Pada Abad Ke-19, Vol 13, No 1, *Jurnal Humaniora* (Februari 2001), h. 67.

Dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan dan juga kurangnya literatur yang berfokus pada kontribusi Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dalam memajukan ekonomi masyarakat Pontianak, serta Kota Pontianak merupakan asal daerah dari penulis sendiri, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengupas tentang Pontianak yang berfokus pada perekonomian masyarakatnya pada masa Kerajaan atau Kesultanan Kadriyah Pontianak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah dan sosial sebagai alat untuk menganalisis. Agar tujuan penelitian tercapai dan pembahasan tidak menyimpang yang didasarkan terhadap ketertarikan mengkaji, meneliti dan menganalisa sejarah. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan kontribusi Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dalam kemajuan ekonomi masyarakat Pontianak pada tahun 1771-1808 M.

METODE PENELITIAN

Dalam menyimpulkan dan mengolah data yang diperoleh, maka diperlukan adanya metode penelitian agar pembahasan yang telah dirancang dapat dipahami dan tercapainya tujuan tujuan sebuah penelitian. Metode yang sesuai dibutuhkan agar penelitian ini dapat berjalan dengan semestinya dan mendapatkan data-data yang lengkap serta selaras dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah agar menghasilkan pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Penulis menggunakan penelitian mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat Pontianak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie merupakan penelitian kualitatif, karena fokus penelitian ini menggunakan data yang berbentuk tulisan bukan data yang berupa angka-angka. Serta dalam penelitian ini dibutuhkan langkah-langkah atau tahapan dalam prosesnya. Beberapa tahapan tersebut adalah heuristik, verifikasi data, interpretasi data dan historiografi.

Untuk mendapatkan data terhadap penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, skripsi, dan tulisan lainnya, baik dari sumber tertulis maupun elektronik.

Penelitian ini adalah kajian tentang kontribusi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie dalam kemajuan ekonomi masyarakat Pontianak. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sejarah yaitu dengan melakukan analisis atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sosial, sebuah pendekatan penelitian yang berupaya untuk memuat informasi dalam rangka menjalin komunikasi dan mengajak masyarakat agar ikut berkontribusi. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada masyarakat Pontianak itu sendiri, untuk mengetahui manfaat yang dirasakan dari kebijakan-kebijakan Sultan Syarif Abdurrahman AL-Qadrie.

Adapun sumber data yang penulis juga jadikan sebagai acuan dalam proses penelitian adalah Sumber data primer yakni buku yang ditulis oleh P.J Veth, dengan judul buku *Borneo's Wester-afdeling. Geographisch, Statistisch, Historisch*, yang diterbitkan di John Noman En

Zoon Zaltbommel Belanda pada tahun 1854. Buku ini adalah salah satu buku yang membahas tentang pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang Kerajaan Kadriyah Pontianak. Buku ini juga ditulis paling dekat tahunnya dengan penelitian yang diambil serta ditulis oleh orang Belanda yang pada sejarahnya bersinggungan langsung dengan sejarah Pontianak khususnya Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Tidak hanya itu, buku ini juga banyak dirujuk oleh para peneliti untuk membantu penelitiannya terkait Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sedangkan sumber sekunder, peneliti mengambil dari beberapa literatur yang berupa jurnal dan buku.

Tulisan ini menggunakan teori peran. Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.²² Penelitian tentang peran Sultan Pontianak, Syarif Abdurrahman Alkadrie menunjukkan perannya sebagai sebuah pemimpin kesultanan. Sebagaimana diketahui, tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.²³

PEMBAHASAN

Ekonomi dalam banyak literatur disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Oikos” atau “Oiku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa ekonomi adalah semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Dalam perkembangannya, kata rumah tangga tidak hanya sekedar merujuk kepada kehidupan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan rumah tangga juga dapat diartikan lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.²⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, baik rumah tangga yang hanya terdiri dari suami, istri dan anak, ekonomi juga sangat penting bagi rumah tangga bangsa, negara dan juga dunia. Oleh karena itu, sebuah wilayah seperti kota misalnya, sangat bergantung kemajuan dari sektor ekonominya. Terdapat banyak penyebab terjadinya kemajuan kota, yang pada awalnya disebabkan oleh tingginya arus migrasi penduduk yang menyebabkan tingginya angka urbanisasi. Ketertarikan bagi para imigran untuk melakukan migrasi atau perpindahan dari suatu

²²Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 47.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 213.

²⁴Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2010), h 1.

tempat seperti desa ke tempat lainnya seperti kota disebabkan adanya anggapan dan kemungkinan mendapatkan kesempatan bekerja dengan upah yang lebih baik dari pada di tempat sebelumnya.²⁵

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka sebuah kota harus memiliki sektor ekonomi yang memadai guna untuk memfasilitasi masyarakatnya terutama untuk memberikan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat merasakan kemakmuran terutama dari segi ekonominya. Kemakmuran masyarakat adalah suatu syarat sebuah pemimpin dikatakan berhasil. Sebagai contoh studi kasus di Kota Pontianak pada masa kesultanan Qadriyah Pontianak yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Kala itu, keadaan ekonomi masyarakat Pontianak sangat berkembang pesat yang tak terlepas dari kontribusi dari pada pemimpin mereka, salah satunya adalah Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie.

Letak geografis Kesultanan Kadriyah Pontianak memiliki keuntungan dalam segi geopolitik dan geostrategis. Sehingga Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie disebut sebagai ahli maritim yang memungkinkan serangan militer ke jantung Kesultanan dapat dimentahkan. Pontianak juga menjadi tempat berkumpulnya barang-barang dari hulu dan luar negeri yang membuat kerajaan lain menjadi iri hati. Mereka berencana untuk menghancurkan Kesultanan Qadriyah Pontianak yang baru berdiri itu. Kemajuan dalam perdagangan ini membuat Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie melakukan ekspansi untuk menguasai Sanggau, sehingga dengan bantuan VOC, ada tanggal 26 Maret 1778, Pontianak berhasil menguasainya. Dengan terjadinya hal ini, semakin memperkuat hubungan Kesultanan Qadriyah Pontianak dengan VOC, hal ini ditandai dengan diangkatnya Willem Adrian Palm sebagai perwakilan dari VOC di Pontianak.²⁶

Adanya intervensi yang dilakukan oleh VOC dalam urusan internal kerajaan membawa kerajaan Pontianak terlibat dalam urusan pertikaian politik dan ekonomi antar kerajaan. Terhitung beberapa konflik yang melibatkan Pontianak diantaranya dengan Mempawah dan Sukadana. Konflik dengan Mempawah terjadi dikarenakan Mempawah menjadi faktor penghalang kemajuan perdagangan di Pontianak. Sedangkan konflik dengan Sukadana dikarenakan mengalirnya komoditas perdagangan dari hulu sungai Kapuas ke Sukadana sehingga Pontianak mengalami penurunan dalam pemasukan bea dan cukai.

Dengan terjadinya hal tersebut, VOC merasa berjasa kepada Pontianak, sehingga VOC mengajukan kontrak kerja sama dengan Sultan Syarif Abdurrahman dan memberikan wilayah Pontianak bagian selatan kepada VOC sebagai tempat mereka melakukan kegiatan. Pemberian ini dikenal dengan nama Tanah Seribu yang meliputi areal seluas 1000 x 1000 meter persegi.²⁷ Tidak hanya sebagai pelabuhan untuk impor dan mengeksport barang dagangan, pelabuhan ini juga digunakan untuk mengangkut masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke daerah luar

²⁵Chotib, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berimigrasi Antarpropinsi Di Indonesia: Penerapan Model Interaksi Spesial dengan Fungsi Logistik"*, (Depok: Lembaga Demografi FEUI, tt), h. 14.

²⁶Haris Firmansyah, "Penggunaan Biografi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah", *Jurnal Agastya*, Vol 11, No 2, Juli 2021, h. 169.

²⁷Hasanuddin, *Proses Terbentuknya Heterogenitas Etnis Pontianak Pada Abad Ke-19*. Vol 13, No 1, *Jurnal Humaniora* (Februari 2001), h. 71.

Kalimantan Barat. Pelabuhan ini dinamakan Pelabuhan Dwikora Pontianak. Dengan letaknya yang sangat strategis, Pontianak mengalami kemajuan yang sangat signifikan, terutama dalam segi ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dijadikannya Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan Kalimantan Barat, sehingga hal ini membuat para pedagang asing seperti Cina, Arab dan Hindia tertarik untuk melakukan migrasi ke Pontianak untuk melakukan perdagangan.²⁸

Perjanjian yang dilakukan antara Kesultanan Pontianak bersama VOC membuat VOC mendapatkan tanah di area selatan istana yang dibatasi oleh sungai Kapuas. Tanah yang diberikan ke VOC itu berukuran 1000 x 1000 meter yang dijadikan VOC sebagai pusat administrasi dan kegiatan Belanda seterusnya dijadikan sebagai lokasi kedudukan pemerintah *Resident het Hoofd Westerafdeeling van Borneo*. Penataan Pontianak pun kemudian diatur secara bersama. Setelah mendapatkan tanah tersebut, VOC walaupun tidak langsung dibangun, setelahnya VOC mendirikan benteng yang diberi nama *Fort Mariannen*. Benteng tersebut dijadikan sebagai pusat pemerintahan serta pertahanan. Sebagaimana benteng-benteng VOC di daerah lain, Fort Mariannen mempunyai tembok besar di dalam dan area sekitar benteng dimana disana tinggal para pejabat, pegawai, dan tentara.²⁹

Perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Belanda di atas sebenarnya mendapatkan reaksi yang tidak berjalan mulus. Kebijakan Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie terhadap Belanda menimbulkan berbagai reaksi di kalangan kesultanan sendiri. Lahirnya Kampung Luar (pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie) dengan kraton kecil secara populer disebut ‘balai’ membuktikan bahwa reaksi tersebut terus berjalan. Sekurangnya terdapat dua hal yang dapat dipelajari dari adanya balai sebagai pemerintahan tandaingan bagi Kesultanan Pontianak. Pertama, bagian ini merupakan perwujudan dari keberhasilan politik pecah belah pemerintah Kolonial Belanda. Kedua, ‘balai’ di Kampung Luar merupakan perwujudan dari sikap dan tindakan beberapa keluarga kesultanan yang anti penjajahan dalam segala bentuknya. Sikap dan tindakan itu dilaksanakan secara konsekuen sampai masa kemerdekaan (bahkan sampai awal abad 20). Lahirnya Kampung Luar sebagai tandangan pemerintahan pusat yang terletak di Kampung Dalam dapat juga dilihat dari segi politis dan sosiologi. Dari segi pertama, lahirnya ‘balai’ dan Kampung Luar merupakan suatu strategi menyusun kekuatan untuk menyerang kembali dan mengembalikan kekuasaan pusat yang independen seperti semula. Di lain pihak, tindakan politis seperti ini akan menarik kembali simpati, dukungan dan kesetiaan seluruh rakyat terhadap kesultanan. Dari segi sosiologis, lahirnya ‘balai’ dan “Kampung Luar” merupakan sebagian perwujudan dari sikap budaya Melayu lokal yang kurang memiliki mabisi, merasa terasing, senang mengalah, dan cenderung acuh dari setiap kompetisi sosial yang dianggap mengancam keutuhan hubungan sosial, dan menghindari

²⁸Lisyawati Nurcahyani, dkk, “Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra”, (Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya, 1999), h. 30.

²⁹Syarif Ibrahim Al-Qodrie dan Pandil Sastrowardoyo. Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak. Kemendikbud: Direktorat Sejarah, 1984. h. 60.

dari setiap konflik yang menyangkut perebutan status sosial. Budaya lokal seperti ini merupakan makanan empuk bagi setiap unsur yang ingin menguasai.³⁰

Letak strategis Pontianak turut dipengaruhi oleh jalur perdagangan selat Malaka, sehingga jalur perdagangan internasional terhubung dengan Singapura sebagai pusat perdagangan setelah runtuhnya Malaka dan menjadi jalur pelayaran Cina-India. Hak inilah yang memberikan kemudahan transportasi sehingga banyak etnis tertarik untuk berdatangan ke Pontianak. Perdagangan yang semakin ramai membuat para pedagang dari daerah-daerah lain di Nusantara serta pedagang asing tertarik untuk tinggal menetap di Pontianak. Setelah mendapatkan izin dari Sultan untuk tinggal di Pontianak mereka membentuk perkampungan dengan asal daerah yang mendirikan perkampungan tersebut. Munculnya perkampungan pedagang tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Pontianak atau bisa dikatakan lebih memperkuat posisi Pontianak sebagai pusat perdagangan.³¹

Secara geografis lainnya, suatu keistimewaan lain dari kota ini ialah karena letaknya berada di bawah garis katulistiwa, yaitu garis yang membelah bumi menjadi dua bagian; belahan utara dan belahan selatan. Karena itu Pontianak juga digelar sebagai kota katulistiwa. Ini mempengaruhi struktur tanah yang juga berada di sana. Sebagai sedimentasi yang menghutan dan kemudian menjadi perkotaan, kondisi tanah cukup stabil. Permukaan tanahnya merupakan endapan bekas hutan yang dikenal dengan istilah tanah 'sepu' dan di bagian bawah merupakan lapisan lumpur dengan 'daya gandar' dengan aktivitas tanah yang relatif rendah. Keadaan ini ditunjang dengan banyaknya sungai besar yang menjadi daya dukung transportasi sejak dahulu. Fakta ini diperkuat secara data, bahwa sampai 1859-an transportasi sungai masih merupakan satu-satunya prasarana transportasi dalam melakukan pemindahan orang dan barang. Inilah yang menjadi alasan mengapa daerah ini seringkali menjadi tujuan para pelancong dan masyarakat migran. Hingga pada akhir abad -19 tatkala kerajaan besar di daerah Kalimantan Barat seperti Kerajaan Sambas, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Kkubu, Kerajaan Sintang dan lain-lain mengalami kemunduran akibat peperangan, Kesultanan Pontianak mendapatkan momennya untuk terus berkembang.³²

Kembali lagi ke peran Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Dengan didukung oleh banyaknya kemudahan dan supporting area di atas. Kebijakan Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie lebih ditekankan pada kebijakan perihal perdagangan. Salah satunya yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie dengan VOC, dimana saat itu, kesepakatan dengan VOC ini menimbulkan polemik tidak hanya bagi internal kesultanan maupun dengan rakyat kesultanan secara umum. Secara data, rasa ketidaksukaan rakyat kesultanan Pontianak terhadap pemerintahan Kolonial adalah kesewenang-wenangan mereka

³⁰Syarif Ibrahim Al-Qodrie dan Pandil Sastrowardoyo. *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Kemendikbud: Direktorat Sejarah, 1984. h. 108.

³¹Haris Firmansyah, Colonial Town Pontianak: Proses Terbentuk dan Perkembangannya Pada Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Voc) Tahun 1779-1791. *Jurnal Artefak*. Vol. 8 No. 2 September 2021.

³²Syarif Ibrahim Al-Qodrie dan Pandil Sastrowardoyo. *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Kemendikbud: Direktorat Sejarah, 1984. h 17-19.

terhadap perubahan taktik yang begitu dibuat-buat ‘bersahabat’. Keputusan ini membuat banyak rakyat antipati terhadap sistem kesultanan dan menganggap mereka berkhianat dengan rakyat. Walaupun harus diakui bahwa apa yang disepakati oleh kedua pihak besar itu telah mampu memberikan dampak penguatan ekonomi. Pihak Kolonial Belanda dan VOC secara khusus, selalu dapat memandaaatkan kesederhanaan cara berpikir masyarakat awal dalam membentuk opini umum terhadap pemerintahan kesultanan.³³

KESIMPULAN

Pontianak di bawah pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie berhasil menjadi daerah yang berkembang dengan pesat terutama dalam sektor ekonominya. Hal ini ditandai dengan dijadikannya Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan tempat kapal-kapal asing bersandar untuk mengimpor dan mengeksport barang. Selain letak Pontianak yang strategis, tentu dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie melalui kebijakannya bekerja sama dengan mitra dagang dan juga mengolah pajak dengan baik dari para pedagang asing yang datang ke Pontianak. Dengan bantuan banyak pihak, salah satunya dengan VOC, Kesultanan Pontianak tidak saja menjadi basis kekuatan perdagangan maritim karena memiliki akses yang luas, tapi juga subjek agrikultur yang kuat. Penelitian ini menunjukkan, beberapa penunjangnya adalah sumber daya alam yang memletak geografis yang strategis, interaksi dengan banyak masyarakat dan diplomatik, serta jaringan perdagangan yang luas.

³³ Syarif Ibrahim Al-Qodrie dan Pandil Sastrowardoyo. *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Kemendikbud: Direktorat Sejarah, 1984. h. 109.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qadrie, Syarif Ibrahim, (1984) *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta.
- Asnaini, (2013), *Sistem Pemerintahan Kota Pontianak 1771-1945*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Abdurrahman, Dudung, (2019), *“Metodologi Penelitian Sejarah Islam”*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Chotib, (tt), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berimigrasi Antarpropinsi Di Indonesia: Penerapan Model Interaksi Spesial dengan Fungsi Logistik*, Depok: Lembaga Demografi FEUI.
- Daliman, (2015) *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Eko, Putro Widoyoko (2012), *Teknik Penyusunan Instrumen Penyusunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heidhues, Mari Somers, (2008), *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di Distrik Tionghoa Kalimantan Barat*, Jakarta: Yayasan Nabil.
- Iwan, Hermawan, (2019), *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode”*, Kuningan: Hidayatul Quran.
- Krippendorff, Klaus, (1991), *Analisis Isi Pengantar dan Metodologi*, Jakarta: CV Rajawali.
- Lisyawati, Nurcahyani, dkk, (1999) *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra*, Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya.
- Putong, Iskandar, (2010) *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana.
- P.J Veth, (1854), *Borneo’s Wester-afdeling. Geographisch, Statistisch, Historisch*, Zaltbommel: Joh. Noman En Zoon.
- Sumanti, Solihah Titin, (2019), *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang*, Yogyakarta: Atap Buku.
- Trijono, Rahat, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Yusuf, Muri, (2017), *Metode penelitian*, Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Bibi, Suprianto (2021), “Sejarah Kesultanan Pontianak Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Pada Tahun 1771-1808”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No 1.
- Firmansyah, Haris, dkk, (Juli 2021), “Penggunaan Biografi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah”, *Jurnal Agastya*, Vol 11, No 2.
- Firmanto, Alfian, (2012) “Jejak Sejarah Kesultanan Pontianak (Kajian Inskripsi Situs Makam Batu Layang)”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol 10, No 2.
- Hasanuddin, (Februari 2001), “Proses Terbentuknya Heterogenitas Etnis Pontianak Pada Abad Ke-19”, *Jurnal Humaniora*, Vol 13, No 1.
- Wibowo, Basuki, (Juni, 2014) “Optimalisasi Kraton Kadriyah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Pontianak Kalimantan Barat”, *Jurnal Edukasi*, Vol 1, No 1.
- Zakaria, Efendi, (2021), “Sejarah Dakwah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri: Islamisasi Di Pontianak”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol 19, No 2.